

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, berkat Rahmat dan Inayah-NYA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2009 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 merupakan dasar penyusunan pelaporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga OPD harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi mengenai program-program utama yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Kota Sukabumi juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun karyawan Inspektorat Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2009 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan

Sukabumi, Januari 2010
INSPEKTUR KOTA SUKABUMI,

HADI WAHYUDIN,S.H.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19601225 198503 1 017

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Bidang Kewenangan.....	3
1.3. Core Area.....	3
1.4. Aspek Statejik Organisasi.....	3
1.5. Struktur Organisasi	4
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA.....	5
2.1. Rencana Strategis.....	5
2.2. Visi Misi.....	6
2.3. Tujuan dan Sasaran.....	8
2.4. Kebijakan dan Program.....	11
2.5. Rencana Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	13
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	15
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	23
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kota Sukabumi adalah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan, yang tugas pokoknya melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pengawasan, terutama mengenai perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan, pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan dan Pembinaan terhadap seluruh perangkat Inspektorat yang profesional sehingga terciptanya kesatuan gerak langkah yang harmonis dalam melaksanakan seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Eksistensi dari institusi Inspektorat sesuai visinya adalah mewujudkan Lembaga Pengawasan Daerah yang kredibel dan akuntabel untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dengan 11 (sebelas) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja dengan tingkat capaian antara 0% samapai dengan 100%.

Realisasi terhadap sasaran yang sudah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran telah tercapai, selanjutnya untuk mempertahankan eksistensi kinerja Inspektorat sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sukabumi dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna bagi tercapainya tingkat pelayanan yang baik di Bidang Pengawasan terhadap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**



**INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI
TAHUN 2009**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi diantaranya penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima. Atas dasar hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan sumber daya manusia aparatur, pengawasan dan akuntabilitas seluruh instansi pemerintah, berkewajiban untuk meneruskan dan menyukseskan cita-cita reformasi yang saat ini sedang berlangsung. Agar dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan beberapa strategi dan kebijakan baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan SDM Aparatur maupun pemantapan koordinasi Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang merupakan kewajiban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah perbaikan Sistem Manajemen Pemerintahan yang difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu pengejawantahan dari *Good Governance* ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai:

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten).
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja, dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2009

berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 Bidang Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, Inspektorat Kota Sukabumi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.3 Core Area

Dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Sukabumi. Pasal 3 disebutkan bahwa Inspektorat mempunyai Tugas Pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program Pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

1.4 Aspek Strategik Organisasi

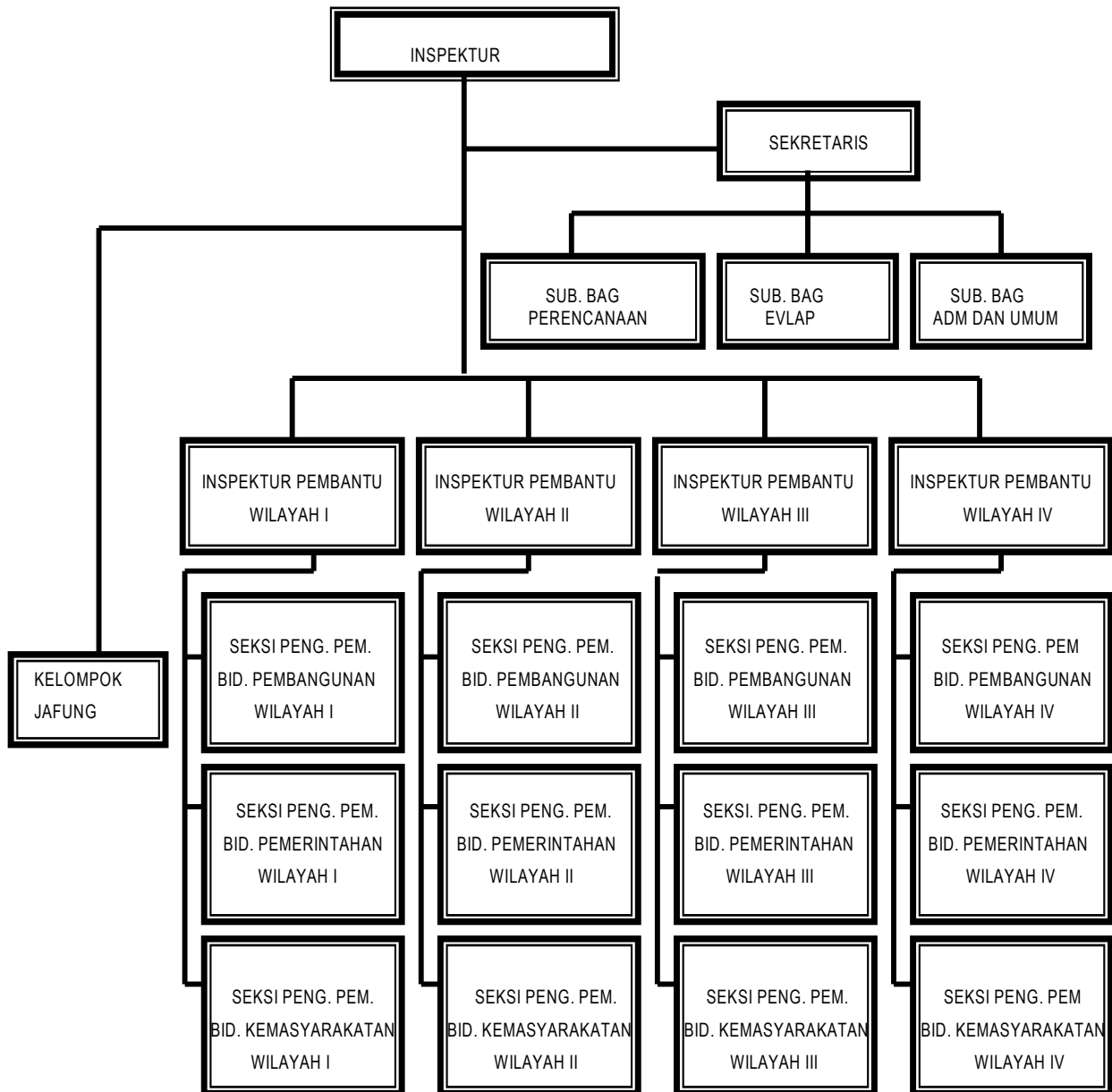
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut Kinerja Inspektorat tidak terlepas dari pelayanan yang prima oleh aparat Inspektorat sendiri sehingga hubungan dan mekanisme kerja antara eksekutif dan legislatif dalam memadukan gerak dan langkahnya dapat terjalin secara harmonis. Hal tersebut merupakan bagian dari proses kinerja Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara optimal agar penyelenggaraan fungsi dan peran pengawasan dapat mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang akuntabel.

1.5 Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada Inspektorat Kota Sukabumi, Struktur Organisasi Inspektorat terdiri atas Inspektur membawahkan satu Sekretaris, empat Inspektur Pembantu, tiga Kepala Sub-Bagian dan dua belas Kepala Seksi Pengawas Pemerintah, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI



KETERANGAN : Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek guna memberikan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, untuk itu Pemerintah Kota Sukabumi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2003-2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008 serta RPJMD Penyelarasan Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009. Dalam RPJPD dan RPJMD memuat Visi dan Misi yang akan menjadi acuan bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sukabumi.

Atas dasar hal tersebut, Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang pengawasan, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2009- 2013 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Inspektorat Kota

Sukabumi dituntut memiliki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam Bab ini termasuk Rencana Kinerja Tahun 2009.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 VISI

Langkah awal dalam *strategy formulation* sebagai tahapan dalam perencanaan strategis adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*Future*) yang realistis atas cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. (Dapat mengisyaratkan adanya misi dan tantangan).

Visi menjawab pertanyaan "*What do we want to become ?* "

Vision statement thinking about "what is our business in the future ? "

A Vision is a statement about the future, spoken or written today, it is a process of managing the present from a stretching view of the future.

Pembuatan visi organisasi merupakan sarana untuk :

- a. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok;
- b. Memperlihatkan *frame work* hubungan antara organisasi dengan *stake holders* (Sumber daya manusia organisasi, konsumen / *citizen*, pihak lain yang terkait);
- c. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan.

Untuk mampu menjadi gambaran yang ingin diwujudkan suatu organisasi, pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi.

Atas dasar pengertian sebagaimana tersebut di atas, maka untuk Tahun 2009 – 2013 Inspektorat Kota Sukabumi harus mendukung baik visi dan misi Kota Sukabumi maupun visi dan misi Walikota Sukabumi Tahun 2008-2013 sehingga visi Inspektorat Kota Sukabumi ditetapkan sebagai berikut:

“ Terwujudnya Lembaga Pengawasan Daerah yang Kredibel dan Akuntabel Untuk Mendukung Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Amanah.”

Penjelasan Visi :

“ Terwujudnya Lembaga Pengawasan yang Kredibel dan Akuntabel “ mempunyai makna bahwa organisasi Inspektorat Kota Sukabumi diharapkan menjadi lembaga yang berisikan aparat pengawas yang memiliki ilmu pengetahuan, kemampuan dan kecakapan yang memadai melalui pengembangan organisasi dan pendidikan / pelatihan yang berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif, efisien, kreatif dan inovatif serta antisipatif dalam menghadapi tantangan tugas ke depan yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan hasil kerjanya.

“ Untuk Mendukung Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Amanah” mempunyai makna bahwa Inspektorat Kota Sukabumi berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga ketiga unsur *local triumvirat* yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan peran dan fungsinya harus transparan, akuntabel, efisien, efektif, bertanggungjawab dengan berpedoman kepada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.2.2. MISI

Pernyataan visi tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam *guidelines* yang lebih pragmatis dan konkrit yang dapat dijadikan acuan pengembangan strategi dan aktivitas dalam organisasi Inspektorat Kota Sukabumi dalam bentuk pernyataan misi. Misi adalah pernyataan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa datang, hal tersebut mengandung arti bahwa pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan / diemban organisasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk kurun waktu tertentu. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya organisasi,

apa yang ingin dicapai organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan intensitas kegiatan pengawasan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan manajemen Aparatur Pemerintah di Daerah, maka untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Sukabumi dijabarkan ke dalam misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta menjelaskan keberadaan Inspektorat Kota Sukabumi untuk melakukan kegiatan pengawasan dan bagaimana cara melakukannya.

Adapun Misi Inspektorat Kota Sukabumi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme aparatur pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengawasan, sarana prasarana, dan sistem prosedur yang tepat guna;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang taat terhadap hukum dan perundang-undangan;
4. Meningkatkan pembinaan aparatur Pemerintah Kota Sukabumi yang baik, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat sebagai upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Inspektorat Kota Sukabumi berdasarkan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Tujuan :

Menguasai beragam pengetahuan dasar dan teknik pengawasan untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Misi 2 :

Meningkatkan kualitas pengawasan, sarana prasarana, dan sistem prosedur yang tepat guna.

Tujuan :

Mewujudkan nilai ekonomis, daya guna, dan hasil guna perangkat kerja yang dibutuhkan serta dapat menguasai dan menaati prosedur pengadaan sarana dan prasarana.

Misi 3 :

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang taat terhadap hukum dan perundang-undangan.

Tujuan :

3.1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang dilaksanakan OPD dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Misi 4 :

Meningkatkan kualitas pengawasan sarana prasarana dan sistem prosedur yang tepat guna.

Tujuan :

4.1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Kota Sukabumi yang mampu mengemban tugas sesuai dengan tuntutan masyarakat.

4.2. Mewujudkan nilai ekonomis, daya guna, hasil guna perangkat kerja yang dibutuhkan serta dapat memahami dan menaati prosedur pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut:

2.4 Kebijakan dan Program

2.4.1 Kebijakan

Wujud nyata strategi adalah berupa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam proses organisasi. Dalam penetapan kebijakan ini pucuk pimpinan (*Top Leader*) harus mampu memformulasikan kebijakan yang menjadi pedoman, suatu mekanisme tindak lanjut untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga setiap pejabat dan pelaksana dalam organisasi mengetahui adanya dukungan dalam pelaksanaan tugas dan implementasi keputusan. Pemilihan kebijakan harus selektif sehingga dapat mempertajam arti strategi sebagai pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan tidak hanya teori. Kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada sesuai dengan kewenangannya, meliputi :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mendorong keinginan dan memotivasi aparat Inspektorat untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan TUPOKSI;
- c. Penyiapan Tim untuk memonitor berbagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh OPD;
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Meningkatkan pengawasan dalam rangka menurunkan jumlah temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara;
- f. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya pengawasan operasional kegiatan dan pengawasan pada OPD dan BUMD;
- g. Standarisasi kualitas pengadaan dan pengelolaan perangkat bantu kerja yang ekonomis, berdaya guna dan berhasil guna;
- h. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya peningkatan kualitas sarana kegiatan aparat pengawasan.

- i. Memberikan pemahaman dan penguasaan prosedur pengadaan sarana dan prasarana kepada aparat Inspektorat

2.4.2 Program

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, Program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Keuangan;
- b. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;
- e. Peningkatan Pemeriksaan Operasional Tugas Pembantuan Provinsi Jabar;
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- g. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.

2.5 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Inspektorat Kota Sukabumi mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 dengan mengacu kepada Rencana Strategik. Susunan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*out come*) berikut rencana capaiannya (*target*) Rencana Kinerja Inspektorat Kota Sukabumi Tahun 2009 disajikan tersendiri dalam Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Peran Inspektorat Kota Sukabumi dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good governance*). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut, Inspektorat Kota Sukabumi telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

3.1. **Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan, pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Kota Sukabumi.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya.
- b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Sukabumi.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

- Indikator masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. *Input* yang digunakan diantaranya dana dengan satuan rupiah, dan personel yang diukur dengan satuan orang.
- Indikator keluaran (*output*) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik. Indikator *output* yang digunakan mulai dari *output* terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah laporan (LHA), jumlah personel (Diklat, pelatihan teknis), buku pedoman yang dibuat maupun jumlah barang / jasa yang dihasilkan.
- Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini digunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang intinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauhmana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pimpinan maupun *Stake holders* lainnya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pengukuran kinerja dimaksud terdiri atas Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang akan disajikan tersendiri dalam Lampiran.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran dan Kegiatan, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Nilai capaian Inspektorat Kota Sukabumi pada Tahun 2009 dapat dilihat dari Kinerja Capaian Sasaran dan Capaian Kegiatan. Adapun Nilai Capaian Kinerja baik capaian sasaran maupun kegiatan sebagai berikut :

3.2.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja sasaran

Dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2009-2013, Rincian capaian sasaran selama Tahun 2009 sebagaimana berikut ini :

1. Tercapainya jumlah aparat pengawasan yang mempunyai kemampuan dibidang pengawasan, dapat dilihat pada Tabel berikut:-

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
Aparatur	Rupiah	144.999.000	126.264.000	87.08	
Pengawasan yang berkualitas Auditor	Orang	3	3	100	
melalui Bimtek:	Kali	1	1	100	
Pelatihan Teknis JFA dan Pelatihan teknis Evaluasi LAKIP					

Keterangan:

Dari beberapa sub kegiatan pelatihan sebanyak 8 (delapan) jenis pelatihan substantif sebagaimana indikator kinerja output yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2009 yang mendukung sasaran dalam Renstra dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengawas, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pelatihan Teknis Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang diikuti oleh 26 orang peserta sesuai capaian target dan diikuti oleh seluruh peserta. Adapun kendala yang dihadapi dari tidak

tercapainya target kegiatan pelatihan yang direncanakan adalah adanya keterbatasan alokasi waktu dan anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk pelatihan teknis Jabatan Fungsional JFA dari target yang direncanakan sebanyak 3 orang terealisasi 100 % sesuai dengan penugasan dari Pusdiklat BPKP.

2. Peningkatan pembinaan kepada aparatur Pemerintah Kota Sukabumi dalam pelaksanaan pelayanan prima (*service of excellent*) kepada seluruh masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
Jumlah OPD yang dibina dan diawasi	LHP	33	33	100	%
	Rupiah	779.051.000	775.986.000	99,61	
	Orang	22	22	100	
	LHM	60	60	100	%
	Rupiah	157.908.000	128.013.500	81,07	
	LP2P	4200	4000	100	

Keterangan:

Kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dengan hasil akhir diindaklanjutinya Penyimpangan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dengan *input* anggaran Rp.779.051.000,00 untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dan Rp.157.908.000 untuk kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan jumlah personil pengawas sebanyak 22 orang, telah melaksanakan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan rencana tingkat capaian target dengan realisasi. Untuk *Output* dari rencana tingkat capaian target sebanyak 33 buku LHP terealisasi sebanyak 34 Buku LHP dengan 134 temuan, 60 Laporan Hasil Monitoring yaitu 15

Laporan Hasil Monitoring OPD dan 45 Laporan Hasil Monitoring APBS SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Kota Sukabumi serta terkirimnya LP2P sebanyak 4000 PNS.

3. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari unsur KKN serta taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
Kasus Indikasi KKN yang ditangani	Rupiah OPD	18.728.000 16	18.553.000 16	99,07 100	%

Keterangan:

Pelaksanaan kegiatan berupa Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan KKN sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dengan *input* anggaran sebesar Rp 18.828.000,00 yang dilaksanakan dengan melakukan pembinaan kepada 16 OPD di Lingkungan Daerah Kota Sukabumi

4. Penggunaan anggaran yang transparan dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
Prosentase realisasi pembangunan sampai dengan 100 % di tahun 2013	OPD	24	24	100	%
	Rupiah	183.318.000	183.323.000	99,93	
	LHR	24	24	24	
	OPD	6	6	100	%
	Rupiah	68.114.000	68.114.000	100	
	LHE	6	6	100	

Keterangan:

Realisasi dari sasaran penggunaan anggaran yang transparan dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan, Evaluasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan input anggaran sebesar Rp 68.114.000,00 dan Reviu atas laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dengan *input* anggaran sebesar Rp 183.318.000,00.

5. Ditindaklanjutinya penyimpangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
LHP yang ditindaklanjuti	Rupiah	122.606.000	121.991.000	99,50	%
	Persen	75	62	82	

Keterangan:

Pelaksanaan kegiatan berupa Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan *input* anggaran sebesar Rp 122.606.000,00, dengan temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti dari BPK RI, Inspektorat Propinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kota Sukabumi, dengan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Sukabumi sebanyak 134 dan yang ditindak lanjuti sebanyak 82 temuan atau sebanyak 62%.

6. Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
LHP yang dimanfaatkan oleh Pengambil Keputusan	Rupiah Kali	65.998.000 1	63.398.000 1	96,06 100	%

Keterangan:

Pelaksanaan kegiatan berupa Evaluasi Berkala Temuan hasil Pengawasan (Gelar Pengawasan Daerah) dengan *input* anggaran sebesar Rp 65.998.000,00 yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

7. Partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan yang bersumber dari pengaduan masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat	Satuan	Rencana	Realisasi	Prosentase	Ket
-------------------	--------	---------	-----------	------------	-----

Capaian Kinerja		Tingkat Capaian (Target)		Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6
Laporan hasil pengaduan masyarakat yang dimanfaatkan oleh pengambil keputusan.	Rupiah kasus	28.083.000 12	15.879.500 9	56,54 75	%

Keterangan:

Kegiatan penanganan kasus-kasus yang bersumber dari masyarakat, dan Media masa direncanakan (diperkirakan) ada 12 kasus dan kenyataannya hanya ada 9 kasus pengaduan.

8. Terwujudnya pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana yang ekonomis berkualitas sesuai dengan anggaran yang tersedia dan perangkat kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tingkat Capaian Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian rencana Tingkat Capaian (target)	Ket
1	2	3	4	5	6
Dipenuhinya sarana dan prasarana dan perangkat kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.	Rupiah	178.775.000	166.610.400	93.20	%
	Persen	75	69	93.20	

Keterangan:

Terpenuhinya sarana dan prasarana serta perangkat kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan *input* anggaran dari kedua program tersebut sebesar Rp 178.775.000,00.

3.2.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan, terdiri atas:

- 3.2.2.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaran sebesar Rp 15.242.000,00, kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan anggaran sebesar Rp 15.146.000,00 dan kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp 30.950.000,00 dilaksanakan untuk tahun 2009 sebagai bagian dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Inspektorat Kota Sukabumi dengan realisasi berupa Laporan Keuangan dan Prognosis serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3.2.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala yang dilaksanakan oleh para auditor di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan jumlah SKPD yang diaudit direncanakan sebanyak 33 Audit dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp. 779.051.000,00 menghasilkan 34 LHP.
- 3.2.2.3 Kegiatan Penanganan Kasus pada Pemerintah di bawahnya dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 28.083.000,00 menghasilkan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 9 kasus yang perlu penanganan.
- 3.2.2.4 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 122.606.000,00 menghasilkan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

- Pengawasan BPK RI, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kota Sukabumi sebanyak 12 buku.
- 3.2.2.5 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 157.908.000,00 dengan realisasi kegiatan berupa dokumen laporan hasil monitoring APBS sebanyak 45 Laporan pada 45 SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kota Sukabumi, Laporan Monitoring kegiatan pemerintahan dan pembangunan sebanyak 15 LHM, serta terkirimnya data LP2P sebanyak 4000 PNS.
- 3.2.2.6 Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang dihadiri para pimpinan SKPD dan BUMD se Kota Sukabumi yang didanai dari APBD Kota Sukabumi Sebesar Rp.65.998.000,00 menghasilkan terinformasikannya temuan hasil audit baik yang telah maupun yang belum ditindaklanjuti oleh auditan.
- 3.2.2.7 Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah yang didanai dari APBD Kota Sukabumi Sebesar Rp.118.318.000,00 menghasilkan laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan SKPD sebanyak 36 buku dan Laporan hasil reviu atas laporan keuangan Pemda sebanyak 6 buku.
- 3.2.2.8 Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 18.728.000,00 dengan sasaran menurunnya penyimpangan yang berindikasi korupsi.
- 3.2.2.9 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja berupa pelatihan Teknis Evaluasi atas LAKIP OPD yang didanai dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 144.999.000,00 diikuti oleh 26 orang auditor di lingkungan Inspektorat Kota Sukabumi.
- 3.2.2.10 Kegiatan Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 68.114.000,00 menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP pada 8 SKPD sebanyak 4 buku dan Petunjuk Teknis Evaluasi LAKIP OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi sebanyak 30 buku.

- 3.2.2.11 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Pelaporan dengan dana dari APBD Kota Sukabumi sebesar Rp 112.624.000,00 berupa tersedianya *data base* hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Kota Sukabumi pada Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Pelaporan.
- 3.2.2.12 Kegiatan pengiriman Diklat Jabatan Fungsional Auditor untuk 3 (tiga) orang Auditor Inspektorat Kota Sukabumi.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1 Laporan Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2009 Inspektorat Kota Sukabumi mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 3.430.129.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi yang dialokasikan untuk :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | Rp.1.370.262.000,00 |
| 2. Belanja Langsung | Rp.2.059.867.000,00 |

3.3.2 Penjelasan Laporan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Inspektorat Kota Sukabumi berpedoman kepada Perda Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2009 Inspektorat Kota Sukabumi mendapat Alokasi Dana sebesar Rp.3.430.129.000,00 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2009 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Inspektorat Kota Sukabumi. Dalam Tahun Anggaran 2009 untuk Belanja Tidak Langsung telah dianggarkan sebesar Rp. 1.370.262.000,00 dialokasikan untuk belanja pegawai terdiri dari:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Gaji dan tunjangan | Rp 1.085.472.000,00 |
| - Tambahan penghasilan PNS | Rp 284.790.000,00 |

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember 2009

Anggaran Rp.1.370.262.000,00

Realisasi Rp.1.558.515.720,00

Prosentase 113,74

Sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan Rp. 2.059.867.000,00 dialokasikan untuk :

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	213.855.000	169.865.516	79,43
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	168.245.000	141.696.971	84,22
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	61.338.000	58.768.000	95,81
4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	1.358.806.000	1.310.167.200	96,42
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	144.999.000	126.264.000	87,08
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	112.624.000	111.111.000	98,66

Dari seluruh program sampai Bulan Desember 2009 yang terealisasi sebesar Rp. 1.917.872.687,00 dengan prosentase mencapai 93,11 %

3.3.3. Laporan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2009 Inspektorat Kota Sukabumi mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp.3.430.129.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi Anggaran tersebut dialokasikan untuk:

1. Belanja Tidak Langsung Rp.1.370.262.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.558.515.720,00 prosentase 113,74 %.
2. Belanja Langsung Rp.2.059.867.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.917.872.687,00 dengan prosentase 93,11%

3.3.4. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

3.3.4.1. Analisis Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dengan Objek Pemeriksaan sebanyak 33 Auditan dapat dilihat sebagai berikut:

Input / Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp.779.051.000,00	Rp.775.986.000,00	99,61
Obrik	33 Auditan.	33 Auditan	100
LHA	33	34	103,03

Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif

3.3.4.2. Analisis Kegiatan Penanganan Kasus pada pemerintahan di bawahnya dapat dilihat sebagai berikut:

Input / Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 28.083.000,00	Rp.15.879.000,00	56,54
LHK	12 LHK	10 LHK	83

Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan tidak efektif

3.3.4.3. Analisis Kegiatan tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dapat dilihat sebagai berikut:

Input / Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp.122.606.000,00	Rp.121.991.000,00	94,50
Laporan	12 Buku	12 Buku	100

Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif

3.3.4.4. Analisis Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif, dapat dilihat sebagai berikut:

Input / Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 157.908.000,00	Rp.128.013.500,00	81,07
LHM	45 LHM APBS	45 LHM APBS	100
	15 LHM SKPD	15 LHM SKPD	100
LP2P	4200 PNS	4000 PNS	95

--	--	--	--

Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif

3.3.4.5. Analisis Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, dapat dilihat sebagai berikut:

Input / Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 65.998.000,00	Rp 63.398.000,00	96,06
Keg	1 Kali Larwasda	1 Kali Larwasda	100

Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif

3.3.4.6. Analisis Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda, dapat dilihat sebagai berikut:

Input	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 118.318.000,00	Rp.118.232.200,00	99,93
LHR	24 LHR Akhir Tahun dan LHR Semesteran	24 LHR Akhir Tahun dan LHR Semesteran	100

Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif

3.3.4.7. Analisis Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat sebagai berikut:

Input	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp. 18.728.000,00	Rp 18.553.000,00	99,07
% Kegiatan	75	75	100

Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif

3.3.4.8 Analisis Kegiatan Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dapat dilihat sebagai berikut:

Input	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 68.114.000,00	Rp.68.114.000,00	100

Laporan	8 LHE SKPD	8 LHE SKPD	100
---------	------------	------------	-----

Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif

3.3.4.9 Analisis Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi LAKIP) dapat dilihat sebagai berikut:

Input/ Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 144.999.000,00	Rp.126.264.000,00	87,08
SDM	26	26	100
Kegiatan	1	1	100

Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif

3.3.4.10. Analisis Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Pelaporan , dapat dilihat sebagai berikut:

Input/ Output	Rencana	Realisasi Pencapaian Kinerja	%
Dana	Rp 112.624.000,00	Rp.111.111.000,00	98,66
Program	1	1	100

Dari kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien dan efektif

3.4. Hambatan/Kendala dan Permasalahan yang dihadapi

- 1) Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan.
- 3) Realisasi pelaksanaan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan jadwal dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 4) Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dari OPD/Auditan yang belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan.

- 5) Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas yang berkualitas Auditor.

3.5. Strategi Pemecahan Masalah

- 1) Mengusulkan anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ Tanggal 23 September 2008 dengan prioritas anggaran minimal 1 % untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas.
- 2) Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 4) Rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor kepada Auditan ditujukan untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu.
- 5) Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan substantif lainnya baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sukabumi.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Sukabumi disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas aparat pengawasan dalam kurun waktu 1 tahun sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kegiatan Pengawasan.
- b. Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti untuk Tahun 2009 sebanyak 82 dari 134 temuan yang ada.
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Diklat Aparat Pengawasan secara keseluruhan mencapai 75 %.
- d. Sebagai simpulan dan Laporan Kinerja Tahun 2009 bahwa dari keseluruhan sasaran dan rencana kerja kegiatan telah direalisasikan dengan capaian 93,11%

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit antara lain melalui:

- Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat;
- Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pemberian laporan (pengaduan masyarakat) sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut;
- Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada OPD yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti.

Sukabumi, Januari 2010
INSPEKTUR KOTA SUKABUMI,

HADI WAHYUDIN, S.H., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19601225 198503 0 017

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
TAHUN 2008**

Instansi : BAWASDA KOTA SUKABUMI

Lampiran IV

No.	Kegiatan	Input		Output		Unit Cost Output (UCO)		Hasil Perhitungan Rumus (%)	% Efisiensi	OUTCOME		Unit Cost Outcome		% Efektifitas	Keterangan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi			Rencana	Realisasi	rencana	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7= 3 : 5	8= 4 : 6	9=7-(8-7)/7 x 100	10=9 - 100	11	12	13=5 : 11	14=6 :12	13=13-(14-13)/13 X 100	14
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	517.281.000,00	517.281.000,00	35	35	14.779.457,14	14.779.457,14	1	0	35	35	1,00	1,00	1	efs&efk
a.	Penanganan Kasus Pada Pemerintah Dibawahnya	31.358.500,00	28.917.400,00	20	18	1.567.925,00	1.606.522,22	-1	-2	20	18	1,00	1,00	1	efs&efk
b.	Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala	517.281.000,00	517.281.000,00	35	35	14.779.457,14	14.779.457,14	1	0	35	35	1,00	1,00	1	efs&efk
c.	Review Atas Laporan Keuangan Daerah	95.941.000,00	95.491.000,00	12	12	7.995.083,33	7.957.583,33	1	0	12	12	1,00	1,00	1	efs&efk
d.	Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan	83.216.000,00	81.883.500,00	10	10	8.321.600,00	8.188.350,00	3	2	10	10	1,00	1,00	1	efs&efk
e.	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	78.800.000,00	51.409.000,00	4200	3543	18.761,90	14.510,02	24	23	4200	3543	1,00	1,00	1	efs&efk
f.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (Larwasda)	44.988.000,00	43.926.500,00	1	1	44.988.000,00	43.926.500,00	3	2	1	1	1,00	1,00	1	efs&efk
g.	Fasilitasi Pengawasan Bagi Pemerintah Kota Sukabumi	100.000.000,00	99.336.000,00	1	1	100.000.000,00	99.336.000,00	2	1	1	1	1,00	1,00	1	efs&efk
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	175.984.500,00	220.604.000,00	22	22	7.999.295,45	10.027.454,55	-24	-25	22	22	1,00	1,00	1	efs&efk
a.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	96.195.000,00	116.195.000,00	9	9	10.688.333,33	12.910.555,56	-20	-21	9	9	1,00	1,00	1	inefs &efk
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.044.500,00	13.714.000,00	1	1	12.044.500,00	13.714.000,00	-13	-14	1	1	1,00	1,00	1	inefs &efk
c.	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas	67.745.000,00	90.695.000,00	12	12	5.645.416,67	7.557.916,67	-33	-34	12	12	1,00	1,00	1	inefs &efk
3	Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	123.444.000,00	122.640.000,00	24	24	5.143.500,00	5.110.000,00	2	1	24	24	1,00	1,00	1	efs&efk
a.	Pelatihan Teknis Substantif Pengelolaan Keuangan berdasarkan SAP	123.444.000,00	122.640.000,00	24	24	5.143.500,00	5.110.000,00	2	1	24	24	1,00	1,00	1	efs&efk
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	254.831.003,00	228.406.004,00	844	845	301.932,47	270.302,96	11	10	844	845	1,00	1,00	1	efs&efk
a.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar	64.925.000,00	39.600.000,00	242	242	268.285,12	163.636,36	40	39	242	242	1,00	1,00	1	efs&efk
b.	Penyediaan Makanan dan Minuman	93.360.000,00	102.480.000,00	1	1	93.360.000,00	102.480.000,00	-9	-10	1	1	1,00	1,00	1	inefs &efk
c.	Penyediaan ATK	14.245.000,00	22.495.000,00	28	28	508.750,00	803.392,86	-57	-58	28	28	1,00	1,00	1	inefs &efk
d.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.860.000,00	4.390.000,00	2	2	11.430.000,00	2.195.000,00	82	81	2	2	1,00	1,00	1	efs&efk

1	2	3	4	5	6	7= 3 : 5	8= 4 : 6	9=7-(8-7)/7 x 100	10=9 - 100	11	12	13=5 : 11	14=6 :12	13=13-(14-13)/13 X 100	14
e.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000,00	2.200.000,00	500	500	4.400,00	4.400,00	1	0	500	500	1,00	1,00	1	efs&efk
f.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5.630.000,00	5.630.000,00	27	27	208.518,52	208.518,52	1	0	27	27	1,00	1,00	1	efs&efk
g.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.820.000,00	20.820.000,00	5	5	4.164.000,00	4.164.000,00	1	0	5	5	1,00	1,00	1	efs&efk
h.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	15.371.000,00	15.371.000,00	24	24	640.458,33	640.458,33	1	0	24	24	1,00	1,00	1	efs&efk
i.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	3	3	2.166.666,67	2.166.666,67	1	0	3	3	1,00	1,00	1	efs&efk
j.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.320.000,00	1.320.000,00	1	1	1.320.000,00	1.320.000,00	1	0	1	1	1,00	1,00	1	efs&efk
k.	Penyediaan bahan bacaan dan PerUUan	7.600.000,00	7.600.000,00	6	6	1.266.666,67	1.266.666,67	1	0	6	6	1,00	1,00	1	efs&efk
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.401.000,00	11.401.000,00	6	6	1.900.166,67	1.900.166,67	1	0	6	6	1,00	1,00	1	efs&efk
a.	Penyusunan LAKIP SKPD	11.401.000,00	11.401.000,00	6	6	1.900.166,67	1.900.166,67	1	0	6	6	1,00	1,00	1	efs&efk
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	24.314.000,00	24.314.000,00	2	2	12.157.000,00	12.157.000,00	1	0	2	2	1,00	1,00	1	efs&efk
c.	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	24.636.000,00	24.480.000,00	2	2	12.318.000,00	12.240.000,00	2	1	2	2	1,00	1,00	1	efs&efk

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2009**

Lampiran III

PROGRAM	Kegiatan				Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berkala	Input : Dana	Rupiah	Rp779.051.000	Rp775.986.000	100%	-	
		SDM	Orang	24	24	100%		
		Output : LHA	Buah	33	34	103%		
		Outcome : Ditindaklanjuti Hasil Temuan Pemeriksaan	%	100	100	100%		
	Penanganan Kasus pada pemerintah di Bawahnya	Input : Dana	Rupiah	Rp28.083.000	Rp15.879.500	57%	-	
		SDM	Orang	14	14	100%		
		Output : Terlaksananya Audit Khusus	kasus	12	26	217%		
		Outcome : terselesaikannya kasus-kasus yang perlu penanganan	%	100	100	100%		
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Input : Dana	Rupiah	Rp122.606.000	Rp121.991.000	99,50%		
SDM		Orang	12	12	100%			
Output : terselesaikannya Tindaklanjuti hasil temuan Pengawasan APFP		%	75	75	100%			
Outcome : Digunakannya Laporan Tindak lanjut hasil Pengawasan oleh Inspektorat untuk kegiatan pengawasan		Buku	12	12	100%			
		%	100	100	100%			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Input : Dana SDM Output : '- LHM Bidang Pemerintahan & Pembangunan '- LHM APBS SD, SMP, SMA, SMK '- Terkirimnya Data LP2P Outcome : Lancarnya Pengawasan terhadap SKPD dan Penyebaran LP2P	Rupiah Orang LHM LHM PNS %	Rp157.908.000 24 15 45 4200 100	Rp128.013.000 24 15 45 4000 100	81.07% 100% 100% 100% 95% 100%	-
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Input : Dana SDM Output :Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Outcome : Terinformasikannya Temuan Hasil Pengawasan Yang Sudah/Belum ditindaklanjuti pada SKPD dan Tersampainya temuan hasil pengawasan pada SKPD	Rupiah Orang Kegiatan %	Rp65.998.000 10 1 100	Rp63.398.000 10 1 100	96.06% 100% 100% 100%	
	Review Atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya kegiatan Review Outcome : Terbitnya LHR Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2008 Digunakannya LHR sebagai bahan kajian sebelum disampaikan kepada BPK-RI	Rupiah Orang Kegiatan LHR %	Rp118.318.000 14 2 24 100	Rp118.323.200 14 2 24 100	99.93% 100% 100% 100% 100%	-
	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi	Input : Dana Output : Terlaksananya Kormonev tentang Pemberantasan Korupsi sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004 Outcome : Menurunnya penyimpangan yang berindikasi Korupsi	Rupiah % %	Rp18.728.000 75 75	Rp18.553.000 75 75	99.07% 100% 100%	-

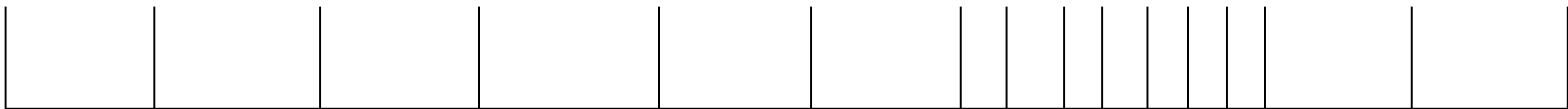
		2	3	4	5	6	7	8	
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Evaluasi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Input	: Dana SDM	Rupiah Orang	Rp68.114.000 14	Rp68.114.000 14	100% 100%	-
			Output	: - Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Lakip (8 SKPD) - Tersedianya Buku Petunjuk Teknis Evaluasi Lakip	Kali Buku	1 30	1 30	100% 100%	
			Outcome	: - Terbitnya LHE Lakip - Digunakannya Buku Petunjuk Teknis Lakip oleh Evaluator dalam melaksanakan Evaluasi Lakip.	LHE %	6 100	6% 100	100% 100%	
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Lakip)	Input	: Dana SDM	Rupiah Orang	Rp144.999.000 26	Rp126.264.000 26	87.08% 100%	-
			Output	: Terlaksananya Pelatihan Teknis Evaluasi Lakip	Kegiatan	1	1	100%	
			Outcome	: Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparat Pengawas dalam bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas Kinerja.	%	75	75	100%	
3.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyusunan Sistem Jaringan Informasi Layanan Publik (SIM Evaluasi dan Pelaporan)	Input	: Dana	Rupiah	Rp112.624.000	Rp111.111.000	98.66%	-
			Output	: Tersedianya Software SIM Evaluasi & Pelaporan	Unit	1	1	100%	
			Outcome	: Tersedianya Data Base Hasil Temuan Inspektorat pada SIM Evaluasi & Pelaporan.	%	100	100	100%	

INDIKATOR CAPAIAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI TAHUN 2008-2013

SESUAI PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG INDIKATOR KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SUKABUMI TAHUN 2008-2013

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Eksisting (2008)	Target Yang Ingin Dicapai					Strategi Pencapaian	
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan		2009	2010	2011	2012	2013	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya Lembaga Pengawasan Daerah yang Kredibel dan Akuntabel Untuk Mendukung Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Amanah	1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah	1.1. Menguasai beragam pengetahuan dasar dan teknik pengawasan untuk mendukung kegiatan pengawasan	1.1.1. Tercapainya jumlah aparat pengawas yang mempunyai kemampuan di bidang pengawasan	Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor	Jumlah aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor dibanding dengan jumlah aparatur x 100%	%	52	60	70	80	90	100		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas keuangan
		2. Meningkatkan Pembinaan	2.1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang dilaksanakan SKPD dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1.1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari KKN serta taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan	Kasus indikasi KKN yang ditangani	Jumlah kasus indikasi KKN yang ditangani dibagi dengan kasus indikasi KKN x 100%	%	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
	2.2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran yang dilaksanakan SKPD dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.1.2. Terwujudnya penggunaan anggaran yang transparan dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat	Prosentase realisasi program dan kegiatan pembangunan s.d. 100% di Tahun 2013	Jumlah realisasi kegiatan pembangunan dibandingkan seluruh program dan kegiatan pembangunan x 100%	%	80	80	85	90	95	100	Memberikan fasilitas bagi terlaksananya pengawasan operasional kegiatan dan pengawasan bidang keuangan pada SKPD dan BUMD	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3.2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	3.2.1. Ditindaklanjutinya penyimpangan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan	Jumlah LHP yang telah ditindaklanjuti (TLHP)	Jumlah LHP yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh LHP x 100%	%	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	
			3.2.2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan yang bersumber dari pengaduan masyarakat	Kasus pengaduan yang ditangani	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani dibandingkan dengan seluruh kasus yang masuk x 100%	%	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	4. Meningkatkan kualitas pengawasan, sarana, prasarana, dan sistem prosedur yang tepat guna	4.1. Mewujudkan nilai ekonomi, daya guna, dan hasil guna perangkat kerja yang dibutuhkan serta dapat memahami dan mentaati prosedur pengadaan sarana dan prasarana	4.1.1. Terwujudnya pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana yang ekonomis, berkualitas sesuai dengan prosedur dan anggaran yang tersedia	Ketersediaan sarana dan prasarana yang bermutu dan sesuai dengan SSH	Jumlah sarana dan prasarana yang bermutu atau ber kondisi baik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan sarana dan prasarana yang ada x 100%	%	100	100	100	100	100	100	Standarisasi kualitas pengadaan dan pengelolaan perangkat bantu kerja yang ekonomis berhasil guna dan berdaya guna	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penataan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan
			4.1.2. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi	Penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu dan tepat mutu	kegiatan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana program pemeriksaan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	Mendorong keinginan dan memotivasi aparat untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai TUPOKSI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
					Penyelesaian LHP dan Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu dibandingkan dengan keseluruhan LHP dan Laporan Kinerja OPD x 100%	%	100	100	100	100	100	100	Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya peningkatan kualitas sarana kegiatan aparat pengawasan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2009**

Lampiran III

PROGRAM	Kegiatan				Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi	Input : Dana	Rupiah	Rp18.728.000	Rp18.553.000	99,07%		
		Output : Terlaksananya Kormonev tentang Pemberantasan Korupsi sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004	%	75	75	100%		
		Outcome : Menurunnya penyimpangan yang berindikasi Korupsi	%	75	75	100%		
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berkala	Input : Dana	Rupiah	Rp779.051.000	Rp775.986.000	100%		-
		Output : LHA	Orang	24	24	100%		
		Outcome : Ditindaklanjuti Hasil Temuan Pemeriksaan	Buah	33	34	103%		
	Penanganan Kasus pada pemerintah di Bawahnya	Input : Dana	Rupiah	Rp28.083.000	Rp15.879.500	57%		-
		Output : Terlaksananya Audit Khusus	Orang	14	14	100%		
		Outcome : terselesaikannya kasus-kasus yang perlu penanganan	kasus	12	9	75%		
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Input : Dana	Rupiah	Rp122.606.000	Rp121.991.000	99,50%		
		Output : Terselesaikannya Tindaklanjuti hasil temuan Pengawasan APFP	Orang	12	12	100%		
		Output : laporan hasil tindaklanjuti	%	75	75	100%		
Outcome : Digunakannya Laporan Tindak lanjut hasil Pengawasan oleh Inspektorat untuk kegiatan pengawasan		Buku	12	12	100%			
			%	100	100	100%		

		2	3	4	5	6	7	8
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Evaluasi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Input : Dana SDM	Rupiah	Rp68.114.000	Rp68.114.000	100%	-
		Output : - Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Lakip (8 SKPD) - Tersedianya Buku Petunjuk Teknis Evaluasi Lakip	Orang	14	14	100%		
		Outcome : - Terbitnya LHE Lakip - Digunakannya Buku Petunjuk Teknis Lakip oleh Evaluator dalam melaksanakan Evaluasi Lakip.	Kali	1	1	100%		
				Buku	30	30	100%	
				LHE	6	6%	100%	
				%	100	100	100%	
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Lakip)	Input : Dana SDM	Rupiah	Rp144.999.000	Rp126.264.000	87.08%	-
		Output : Terlaksananya Pelatihan Teknis Evaluasi Lakip	Orang	26	26	100%		
		Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparat Pengawas dalam bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas Kinerja.	Kegiatan	1	1	100%		
				%	75	75	100%	
3.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyusunan Sistem Jaringan Informasi Layanan Publik (SIM Evaluasi dan Pelaporan)	Input : Dana	Rupiah	Rp112.624.000	Rp111.111.000	98.66%	-
		Output : Tersedianya <i>Software</i> SIM Evaluasi & Pelaporan	Unit	1	1	100%		
		Outcome : Tersedianya Data Base Hasil Temuan Inspektorat pada SIM Evaluasi & Pelaporan.	%	100	100	100%		

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

Instansi : **BADAN PENGAWASAN DAERAH**

Sasaran	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Program	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Capaian (Target)
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Ditindaklanjutinya penyimpangan di bidang Pemerintahan dan Pertanahan, Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Aparatur dan Trantib dan Bidang Keuangan dan Kekayaan	Ditindaklanjuti Hasil Temuan Bidang Pemerintahan, Ekbang, Aparatur dan Terantib serta Keuangan dan Kekayaan dan 29 sekolah	LHA	73	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berkala	Input : Dana SDM Output : LHA Outcome :Ditindaklanjuti Hasil Temuan Bidang Pemerintahan, Ekbang, Aparatur dan Terantib serta Keuangan dan Kekayaan dan 29 sekolah	Rupiah Orang Buku %	368.896.000 26 73 100
2. Ditindaklanjutinya Temuan atas kegiatan yang tidak mencapai sasaran	Ditindaklanjuti Laporan Hasil Temuan Monitoring	LHM	100	Peningkatan Audit Operasional tugas pembantuan Provinsi Jawa Barat.	Monitoring terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang didanai dari Bantuan Gubernur	Input : Dana SDM Output : Buku Laporan Monitoring Outcome : Ditindaklanjuti Laporan Hasil Temuan Monitoring	Rupiah Orang Buku %	25.000.000 10 8 100
3 Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Pengawasan	Terlatihnya Auditor Pengawas dalam Audit Pengelolaan Keuangan berdasarkan SAP	Orang	30	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Pelatihan Teknik Substantif, Pengelolaan Keuangan Berdasarkan SAP	Input : Dana SDM Output : Terlatihnya Auditor Pengawas dalam Audit Pengelolaan Keuangan berdasarkan SAP Outcome : Terwujudnya Laporan Keuangan pada SKPD	Rupiah Orang Orang %	123.444.000 10 30 100
	Terlatihnya Aparat Pengawas dalam Melaksanakan review Lap.Keu	Orang	30	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Pemantapan Review Laporan Keuangan	Input : Dana SDM Output : Terlatihnya Aparat Pengawas dalam Melaksanakan review Lap.Keu Outcome : Terlaksananya Review Laporan Keuangan sesuai SAP	Rupiah Orang Orang %	50.000.000 10 30 100

1	2		3	4	5	6	7	8	
4	Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Temuan hasil audit yang ditindaklanjuti	Laporan Hasil Larwasda	LHM	1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Menyelenggarakan Gelar Pengawasan Daerah	Input : Dana SDM Output : Laporan Larwasda Outcome : Tuntasnya Temuan-temuan hasil Audit selama tahun 2007	Rupiah Orang Buah %	44.988.000 14 1 100
			Buku	10	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Tindaklanjut Hasil temuan Pengawasan	Input : Dana SDM Output : Buku laporan tindaklanjut hasil temuan pengawasan audit Outcome : Digunakannya laporan hasil tindaklanjut hasil pengawasan oleh Bawasda untuk kegiatan pengawasan	Rupiah Orang Buah %	139.331.000 12 10 100
			Blangko LHM	4000 15	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Melaksanakan kegiatan pendistribusian dan pengumpulan LP2P dan Terselenggaranya pengawasan terhadap SKPD	Input : Dana SDM Output : data LP2P dari 4000 PNS dan LHM Outcome : Terkirimnya data 4000 LP2P ke Depdagri dan Lancarnya pengawasan terhadap SKPD	Rupiah Orang Buah %	78.800.000 20 4000, 15 LHM 100
5	Meningkatkan sarana Kantor sebanyak 8 unit filling cabinet dan sarana Transportasi roda dua sebanyak 6 unit dan roda empat sebanyak dua unit dan sarana lainnya.	Terpenuhinya sarana kantor dalam menunjang kegiatan pengawasan sesuai dengan renstra	Unit	6	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Terpenuhinya sarana kantor dalam menunjang kegiatan Pengawasan	Input : Dana SDM Output : Kendaraan Roda 2 Outcome : Terpenuhinya sarana kantor dalam menunjang kegiatan pengawasan	Rupiah Orang Buah %	25.000.000 2 Unit 0,33
6	Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan yang bersumber dari pengaduan.	Terselesaikan kasus-kasus yang butuh penanganan	%	100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Penanganan Kasus Pada Pemerintah di Bawahnya	Input : Dana SDM Output : Laporan Audit Khusus Outcome : Terselesaikan kasus-kasus yang butuh penanganan	Rupiah Orang Buah %	53.485.000 10 15 100

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2007**

Instansi : **BADAN PENGAWASAN DAERAH**

Lampiran II

Sasaran		Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Program	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Rencana Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Ditindaklanjutinya penyimpangan di bidang Pemerintahan dan Pertanahan, Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Aparatur dan Trantib dan Bidang Keuangan dan Kekayaan	Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Aparatur dan Trantib, Bidang Keuangan dan	63	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berkala	Input : Dana SDM Output : LHA Outcome :Ditindaklanjuti Hasil Temuan Bidang Pemertintahan,Ekbbang, Aparatur dan Terantib serta Keuang an dan Kekayaan dan 29 sekolah	Rupiah Orang Buah %	Rp391.485.000 24 63 100
2.	Ditindaklanjutinya Temuan atas kegiatan yang tidak mencapai sasaran	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti atas kegiatan monitoring yang didanai dari bantuan Gubernur	100	Peningkatan Audit Operasional tugas pembantuan Provinsi Jawa Barat.	Monitoring terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang didanai dari Bantuan Gubernur	Input : Dana SDM Output : Buku Laporan Monitoring Outcome : Digunakannya hasil Monitoring	Rupiah Orang Buah %	Rp25.000.000 14 8 100
3	Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Pengawasan	Meningkatkan pengetahuan Aparat Pengawasan terhadap Pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	30	Peningkatan Kegiatan Diklat Aparat Pengawasan	Bimtek Audit Atas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor.13 Tahun 2005	Input : Dana SDM Output : Terlatihnya Aparat Pengawasan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 Outcome : Meningkatnya kemampuan Aparat Pengawas tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 13/2006	Rupiah Orang Orang %	Rp47.435.000 12 30 100
		Meningkatkan pengetahuan Aparat Pengawasan dalam Audit review laporan keuangan pemda kota Sukabumi	30	Peningkatan Kegiatan Diklat Aparat Pengawasan	Bimtek Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Input : Dana SDM Output : Terlatihnya Aparatur Pengawas dalam melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Kota Sukabumi Outcome : Meningkatnya kemampuan Aparat Pengawas tentang review atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Kota Sukabumi	Rupiah Orang Orang &	Rp94.909.000 13 30 100
		Meningkatkan pengetahuan Aparat Pengawasan dalam Audit Investigasi	29	Peningkatan Kegiatan Diklat Aparat Pengawasan	Bimtek Audit Investigasi	Input : Dana SDM Output :Terlatihnya Auditor dalam melaksanakan audit investigasi Outcome : Meningkatnya Kemampuan Auditor dalam melaksanakan Audit Investigasi	Rupiah Orang Buah %	Rp50.000.000 10 29 100

1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Temuan hasil audit yang ditindaklanjuti	Bertemunya Auditan dengan Auditor	1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Menyelenggarakan Gelar Pengawasan Daerah	Input : Dana SDM Output : Jumlah temuan yang di tindak lanjuti Outcome : Tuntasnya Temuan-temuan hasil Audit selama tahun 2007	Rupiah Orang Buah %	Rp38.918.000 14 65 100
			10	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Tindaklanjut Hasil temuan Pengawasan	Input : Dana SDM Output : Buku laporan tindaklanjut hasil temuan pengawasan audit Outcome : Digunakannya laporan hasil tindaklanjut hasil pengawasan oleh Bawasda untuk kegiatan pengawasan	Rupiah Orang Buah %	Rp70.490.000 12 10 100
			4000	Peningkatan peran serta aparatur pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pembinaan.	Melaksanakan kegiatan pendistribusian dan pengumpulan LP2P	Input : Dana SDM Output : data LP2P dari 4000 PNS Outcome : Terkirimnya data 4000 LP2P ke Depdagri dan Propinsi	Rupiah Orang Buah %	Rp43.478.000 24 4000 100
5	Terwujudnya petunjuk operasional sebanyak 1 jenis.	Tersedianya buku Daftar Materi Pemeriksaan	30	Program Penataan dan Penyempurnaan Pengawasan	Penyusunan Naskah Akademik DMP	Input : Dana SDM Output : Buku DMP Outcome : Tersedianya Buku DMP sebagai acuan Program Kerja Audit	Rupiah Orang Buah %	Rp33.593.000 23 30 100
6	Terwujudnya Pengelolaan data elektronik pada lembaga sebanyak 8 unit Komputer dan 1 unit LCD.	Terwujudnya pengelolaan data elektronik sarana dan prasaran	5	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Prosedur Pengawasan	Penyusunan Sistem Jaringan Informasi Layanan Publik	Input : Dana SDM Output : Jaringan Intranet Outcome : Digunakan jaringan intranet dlm pelaksanaan pengawasan	Rupiah Orang Buah %	Rp3.175.000 5 100
7	Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan yang bersumber dari pengaduan.	Tertanganinya laporan dari masyarakat	20	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Penanganan Kasus Pada Pemerintah di Bawahnya	Input : Dana SDM Output : Laporan Audit Khusus Outcome : terselesaikan kasus-kasus yang butuh penanganan	Rupiah Orang Buah %	Rp38.653.000 10 20 100

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2006-2010**

Lamp

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN		KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			
				KEBIJAKAN	PROGRAM		2006	2007	2008	2009
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Menjadi Lembaga dan Aparat Pengawasan yang Profesional dan Kredibel untuk Mendorong terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)	1. Mendorong Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan tugas Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kota Sukabumi dalam Wewujudkan Pelayanan prima bagi masyarakat Melalui Pengawasan Yang handal.	1.1. Meningkatkan Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya dan output SKPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.	1.1.1. Ditindaklanjuti Penyimpangan di - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan.	A. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD.	A.1. Peningkatan Audit Operasional bidang Pemerintahan.	A.1.1. Audit Reguler Bidang Pemerintahan, ekbang dan bidang Aparatur / Trantib.	50	50	53	53
						B.1.1. Efektivitas Pengawasan / Monitoring.	1	1	1	1
		B.1.2. Pemeriksaan / audit khusus atas kegiatan pemerintahan dan Pembangunan	1	1	1	1				
	2. Mendorong Terciptanya Aparatur Pemerintah Kota yang bersih, Transparan dan Akuntabel serta meng - hargai partisipasi Masyarakat.	2.1. Meningkatkan Pembinaan dan tindakan pencegahan penyimpangan anggaran dan operasi pada SKPD	2.1.1 Meningkatkan Pem - binaan dan tindakan pencegahan penyimpangan anggaran dan operasi pada SKPD.	C. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya Pengawasan bidang keuangan / BUMD pada SKPD.	C.1. Peningkatan Audit Operasional Bidang Keuangan dan BUMD.	C.1.1. Audit Reguler Bidang Keuangan.	15	16	17	18
						C.1.2. Audit Reguler Bidang Pengelolaan APBS	2	2	2	2
						C.1.3 Monitoring PADS C.1.4. Audit atas Pengelolaan APBS SMP/SMA/SMK Negeri	1 1	1 1	1 1	1 1
	3. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan dan sarana Pengawasan dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pengawasan.	3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat pengawasan.	3.1.1 Meningkatkan kualitas Sumber daya aparat pengawasan.	D. Memberikan kesempatan kepada aparat pengawas untuk mengikuti Diklat Teknis di bidang Pengawasan.	D.1. Peningkatan kegiatan Diklat Aparat Pengawasan.	D.1.1. Pelatihan Teknis Audit JFA.	3	3	4	2
						D.1.2. Bimbingan Teknis Audit Atas LAKIP.	1	-	-	-
						D.1.3. Bimbingan Teknis Fraud Auditing. D.1.4. Bimbingan Teknis Audit Anggaran Berbasis Kinerja / Audit Kinerja. D.1.5. Bimbingan Teknis Audit Manajemen Proyek.	- 1 1	1 - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						D.1.6. Bimbingan Teknis Penanganan TP.TGR	-	-	1	-
						D.1.7. Bimbingan Teknis Audit Investigasi.	-	-	1	-
						D.1.8. Bimbingan Teknis Audit Analisis Beban Kerja.	-	-	-	1
						D.1.9. Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang dan jasa.	1	-	-	-
		3.2. Meningkatkan Kualitas Sarana Pengawasan	3.2.1. Terwujudnya Pengelolaan data elektronik pada lembaga sebanyak 8 unit Komputer dan 1 unit LCD.	E. Memberikan fasilitasi bagi terlaksananya peningkatan kualitas sarana kegiatan Aparat Pengawasan.	E.1. Peningkatan Sarana Pengawasan.	E.1.1. Mengusulkan Pengadaan Komputer 8 Unit.	2	2	2	1
			3.2.2. Meningkatkan sarana Kantor sebanyak 8 unit filling cabinet dan sarana Transportasi roda dua sebanyak 6 unit dan roda empat sebanyak dua unit dan sarana lainnya.			E.1.2. Mengusulkan Pengadaan 1 unit LCD.	-	1	-	-
			3.2.3. Terwujudnya petunjuk operasional sebanyak 1 jenis.			E.2.1. Mengusulkan Pengadaan 8 Unit Filling Kabinet.	2	2	2	1
						E..2.2. Mengusulkan sarana transportasi Roda 2 sebanyak 6 unit dan roda 2 sebanyak 2 unit.	R2 1	2	2	1
						E.1.3. Menyusun Daftar Materi Audit.	R4 -	1	1	-
							1	-	-	-
		3.3. Meningkatkan Efektivitas Peran serta Aparat Pengawasan.	3.3.1. Meningkatkan Efektivitas dan kualitas temuan hasil Audit yang Ditindaklanjuti.	F. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Aparat Pengawas untuk lebih produktif dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan.	F.1. Peningkatan peran serta Aparatur Pengawasan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan/ Pembinaan.	F.1.1. Mengadakan Gelar Pengawasan Daerah.	1	1	1	1
						F.1.2. Tindaklanjuti dan Pemutakhiran data hasil audit reguler APFP.	1	1	1	1
						F.1.3. Melaksanakan Kegiatan Pendistribusian dan Pengumpulan LP2P.	1	1	1	1
						F.1.4. Evaluasi LAKIP SKPD.	-	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat bidang pengawasan dengan melakukan pemberantasan praktek - praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.	4.1. Meningkatkan efektivitas peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan dan pembangunan.	4.1.1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan yang bersumber dari pengaduan.	G. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan.	G.1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengawasan.	G.1.1. Penanganan Kasus-kasus atas pengaduan masyarakat, DPR dan Mass Media.	1	1	1	1

piran I

2010
12
55
1
1
18
2
1
1
2
-
-
-
-

12

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12
1

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2009**

Instansi : INSPEKTORAT KOTA SUKABUMI

Lampiran IV

Sasaran	Indikator	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket	
1	2		3	4	5	6	
1	Tercapainya jumlah Aparat Pengawas yang mempunyai kemampuan di Bidang Pengawasan.	Aparatur Pengawasan yang berkualifikasi Auditor	%	60	60	100%	
2	Peningkatan Pembinaan Kepada Aparatur Pemerintah Kota Sukabumi dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima (Service Of Excellent) kepada seluruh masyarakat.	Jumlah OPD yang dibina dan diawasi sampai dengan 100% di Tahun 2013	%	80	80	100%	
3	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Bebas dari Unsur KKN serta Taat terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.	Kasus Indikasi KKN yang ditangani	%	100	100	100%	
4	Penggunaan Anggaran Yang Transparan dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.	Prosentase Realisasi Pembangunan sampai dengan 100% di Tahun 2013	%	80	80	100%	

1	2		3	4	5	6	
5	Ditindaklanjutinya Penyimpangan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.	Jumlah LHP yang Ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh LHP	LHP %	33 100	34 100	103% 100%	
6	Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti.	LHP yang dimanfaatkan oleh Pengambil Keputusan sampai dengan 100% di Tahun 2013	%	90	90	100%	
7	Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pengawasan yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat.	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat yang dimanfaatkan oleh Pengambil Keputusan sampai dengan 100% di Tahun 2013	%	75	75	100%	
8	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Ekonomis, Berkualitas sesuai dengan anggaran yang tersedia.	Dipenuhinya Sarana dan Prasarana Kebutuhan Bidang Pengawasan	%	72	72	100%	
9	Perangkat Kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.	Dipenuhinya perangkat kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.	%	72	72	100%	
10	Tercapainya Aparatur Inspektorat yang memahami dan Mentaati Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana.	Aparatur yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	33	1	3.03%	

1	2		3	4	5	6

1	2		3	4	5	6

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2009**

Lampiran III

PROGRAM	Kegiatan				Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi	Input : Dana	Rupiah	Rp18.728.000	Rp18.553.000	99,07%		
		Output : Terlaksananya Kormonev tentang Pemberantasan Korupsi sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004	%	75	75	100%		
		Outcome : Menurunnya penyimpangan yang berindikasi Korupsi	%	75	75	100%		
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berkala	Input : Dana	Rupiah	Rp779.051.000	Rp775.986.000	100%		-
		Output : LHA	Orang	24	24	100%		
		Outcome : Ditindaklanjuti Hasil Temuan Pemeriksaan	Buah	33	34	103%		
	Penanganan Kasus pada pemerintah di Bawahnya	Input : Dana	Rupiah	Rp28.083.000	Rp15.879.500	57%		-
		Output : Terlaksananya Audit Khusus	Orang	14	14	100%		
		Outcome : terselesaikannya kasus-kasus yang perlu penanganan	kasus	12	9	75%		
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Input : Dana	Rupiah	Rp122.606.000	Rp121.991.000	99,50%		
		Output : Terselesaikannya Tindaklanjuti hasil temuan Pengawasan APFP	Orang	12	12	100%		
		Output : laporan hasil tindaklanjuti	%	75	75	100%		
Outcome : Digunakannya Laporan Tindak lanjut hasil Pengawasan oleh Inspektorat untuk kegiatan pengawasan		Buku	12	12	100%			
			%	100	100	100%		

		2	3	4	5	6	7	8
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Evaluasi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Input : Dana SDM	Rupiah	Rp68.114.000	Rp68.114.000	100%	-
		Output : - Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Lakip (8 SKPD) - Tersedianya Buku Petunjuk Teknis Evaluasi Lakip	Orang	14	14	100%		
		Outcome : - Terbitnya LHE Lakip - Digunakannya Buku Petunjuk Teknis Lakip oleh Evaluator dalam melaksanakan Evaluasi Lakip.	Kali	1	1	100%		
				Buku	30	30	100%	
				LHE	6	6%	100%	
				%	100	100	100%	
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Lakip)	Input : Dana SDM	Rupiah	Rp144.999.000	Rp126.264.000	87.08%	-
		Output : Terlaksananya Pelatihan Teknis Evaluasi Lakip	Orang	26	26	100%		
		Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparat Pengawas dalam bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas Kinerja.	Kegiatan	1	1	100%		
				%	75	75	100%	
3.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyusunan Sistem Jaringan Informasi Layanan Publik (SIM Evaluasi dan Pelaporan)	Input : Dana	Rupiah	Rp112.624.000	Rp111.111.000	98.66%	-
		Output : Tersedianya <i>Software</i> SIM Evaluasi & Pelaporan	Unit	1	1	100%		
		Outcome : Tersedianya Data Base Hasil Temuan Inspektorat pada SIM Evaluasi & Pelaporan.	%	100	100	100%		